

BAB II

POSTUR PERTAHANAN INDONESIA

A. Pendahuluan

Sebelum memasuki pembahasan utama mengenai kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400, bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai postur pertahanan Indonesia yang terdiri dari gambaran postur pertahanan Indonesia saat ini, keadaan terkini Tentara Nasional Indonesia, dan gambaran umum keadaan industri pertahanan Indonesia saat ini. Hal ini penting untuk dibahas untuk mengetahui latar belakang dan kepentingan Indonesia sehingga memerlukan adanya kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400. Maka dari itu dalam bab dua ini penulis akan mendeskripsikan perlunya Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400 ditinjau dari postur pertahanan Indonesia.

B. Postur Pertahanan Indonesia

Pada dokumen Kebijakan Pertahanan Negara Tentang *Minimum Essential Forces* Komponen Utama bahwa Kementerian Pertahanan menyiapkan postur pertahanan negara yang disusun berdasarkan keterpaduan antara kekuatan, kemampuan, dan pengeluaran sumber daya nasional yang disusun dalam sistem pertahanan negara (Badan Sarana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010). Postur pertahanan negara dikembangkan dari strategi pertahanan negara dengan menimbang faktor geopolitik dan

geostrategi Indonesia, serta karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas. Postur pertahanan militer dikembangkan pada pola Tri-Matra Terpadu antara kekuatan matra darat, kekuatan matra laut, dan kekuatan matra udara (Sisriadi, 2016).

Dijelaskan pula bahwa kekuatan pertahanan militer mencakup beberapa aspek diantaranya organisasi, peralatan utama sistem senjata dan pendukungnya, serta aspek pangkalan. Sedangkan kemampuan pertahanan militer memiliki lima kemampuan utama, di antaranya kemampuan pertahanan, kemampuan intelijen, kemampuan dukungan, kemampuan pemberdayaan wilayah dan kemampuan keamanan. Kekuatan pertahanan yang sudah terbentuk secara profesional, lalu dikembangkan pada suatu gelar kekuatan pertahanan militer yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman nyata dan menangkal ancaman potensial (Puspen TNI, 2007).

Supaya dapat menciptakan postur pertahanan yang ideal, ada tiga parameter yang dapat digunakan, yaitu strategi pertahanan negara, postur pertahanan militer dan doktrin TNI. Pertama, strategi pertahanan negara yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan ancaman, sehingga secara substantif bersifat prosedural. Sedangkan pertimbangan konstelasi geografis kurang mendapat porsi yang memadai pada pemikirannya. Kedua, postur pertahanan militer sebagian besar lebih mengakomodasi aspek taktis yang mencakup konsep kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan. Faktor geografi dalam penyusunan postur pertahanan militer belum terefleksikan secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari gelar kekuatan yang belum proporsional dilihat dari aspek kematraan dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia. Ketiga, konsep Tri-matra Terpadu dalam doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” lebih memberikan gambaran tentang penggabungan antara satuan- satuan ketiga matra dalam

satu komando tugas gabungan, yang komposisinya disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan jenis operasi yang akan dilaksanakan (Puspen TNI, 2007).

Secara sederhana, pembutan pertahanan militer dapat digambarkan sebagai kolaborasi dinamis antara fungsi-fungsi peperangan yang ada pada masing-masing matra yang dipadukan sehingga menghasilkan satu kekuatan pertahanan militer yang solid untuk menghadapi ancaman. Yang dimaksud dengan fungsi peperangan adalah pengelompokan kegiatan dan sistem yang memiliki kesamaan, yang digunakan oleh Panglima untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan peperangan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: 1. fungsi sensor, 2. fungsi komando dan pengendalian, 3. fungsi pemukul, 4. fungsi mobilitas, 5. fungsi proyeksi kekuatan, dan 6. fungsi dukungan (Sisriadi, 2016).

Fungsi sensor adalah kegiatan mengumpulkan informasi/data, pengolahan informasi/data menjadi intelijen, dan distribusi intelijen kepada unsur-unsur lain yang ada dalam mandala operasi. Fungsi sensor pertahanan militer disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat taktis, operasional sampai dengan tingkat strategis. Fungsi sensor yang handal harus dapat memadukan sensor teknis (radar, satelit) dan sensor manusia dengan proporsional. Penyelenggaraan fungsi sensor dapat optimal apabila didukung oleh system sensor yang handal, yang mengkolaborasikan kemampuan sistem penginderaan jarak jauh yang didukung oleh komputer dan teknologi informatika serta sistem komunikasi yang terpecaya dan aman (Puspen TNI, 2005).

Fungsi komando dan pengendalian diartikan sebagai kegiatan penggunaan kekuasaan dan kewenangan oleh seorang komandan secara tepat terhadap satuan bawahannya atau satuan-satuan lain yang berada dibawah kewenangannya dalam melaksanakan tugas atau operasi. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa komando dan pengendalian adalah pusat dari kegiatan peperangan

yang dilakukan oleh satuan-satuan yang terlibat secara langsung dan yang tidak langsung dalam kampanye militer didalam mandala perang. Fungsi ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan peperangan. Pada pelaksanaannya fungsi ini dilakukan oleh Panglima/Komandan yang didukung oleh sistem komando dan kendali yang meliputi fasilitas dan peralatan, personel, prosedur dan manajemen informasi (Puspen TNI, 2005)

Fungsi pemukul diselenggarakan melalui kegiatan penghancuran terhadap kekuatan lawan dengan menggunakan peralatan utama sistem senjata (Alutsista). Alutsista adalah salah satu elemen utama dari fondasi pertahanan militer yang menghasilkan efek penggentar (*deterrence effect*) untuk mencegah lawan melakukan penyerangan terhadap negara lain. Oleh karena itu, pengembangan kekuatan pertahanan militer harus memberikan perhatian lebih pada pengadaan Alutsista, baik buatan dalam negeri maupun luar negeri (Pramodhawardani, 2009).

Pengadaan Alutsista dalam rangka pengembangan kekuatan pertahanan militer suatu negara seringkali terkendala oleh beberapa masalah. Pada negara berkembang, masalah klasik yang mengemuka adalah keterbatasan jumlah anggaran pemerintah, sedangkan pada negara-negara maju masalahnya adalah rendahnya dukungan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah untuk belanja militer. Oleh karena itu, setiap negara selalu berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses akuisisi Alutsista (Pramodhawardani, 2009).

Belajar dari pengalaman negara lain, salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi akuisisi Alutsista adalah dengan membuat perencanaan kebutuhan Alutsista secara terintegrasi antar matra. Melalui perencanaan kebutuhan secara terintegrasi, maka dapat mencegah munculnya redundansi dalam pengadaan Alutsista lintas matra. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari perencanaan

secara terintegrasi adalah meningkatnya interoperabilitas dan interkoneksi pada saat dioperasikan oleh masing-masing matra di daerah operasi (Pramodhawardani, 2009).

Ada pula upaya yang dapat ditempuh salah satunya dengan memproduksi Alutsista secara mandiri. Upaya pemerintah untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 pantas mendapat apresiasi, karena dengan menggunakan produk-produk industri pertahanan dalam negeri, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan Alutsista buatan luar negeri yang sangat penting namun tidak dapat diproduksi mandiri dalam negeri (Sisriadi, 2016).

Fungsi mobilitas adalah penyelenggaraan kegiatan pemindahan pasukan dari satu daerah operasi ke daerah operasi lain di mandala perang untuk mendekatkan pasukan sendiri kepada musuh atau memusatkan kekuatan. Fungsi ini dalam fondasi pertahanan militer memiliki peran yang paling krusial dihadapkan pada luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan. Penyelenggaraan fungsi mobilitas harus didukung oleh system transportasi militer yang mampu memobilisasi pasukan secara tepat waktu dan tepat tujuan (Sisriadi, 2016).

Fungsi proyeksi kekuatan adalah kegiatan penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi suatu krisis, meningkatkan stabilitas kawasa dan memberikan efek tangkal. Istilah ini digunakan oleh banyak negara dengan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik geografi negara yang bersangkutan (Sisriadi, 2016).

Fungsi dukungan adalah fungsi yang berkaitan dengan kemampuan dukungan militer dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Fungsi dukungan memiliki spektrum yang sangat luas, baik dalam OMP maupun OMSP. Dalam OMP, fungsi

dukungan mencakup dukungan operasi pertahanan udara nasional, dukungan operasi intelijem, dukungan operasi teritorial, dukungan operasi informasi, dukungan operasi NUBIKA, dukungan operasi PERNIKA, dukungan operasi SURTA, dukungan operasi khusus, dukungan operasi pengungsian, dan dukungan operasi SAR. Sedangkan pada OMSP mencakup dukungan bantuan penganggulangan bencana dan keanusiaan, dukungan operasi pengungsian dan dukungan operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Sisriadi, 2016).

Selain pembuatan pertahanan militer berdasarkan lima prinsip di atas, adapun kebijakan dalam membangun postur perthanan Indonesia yang ideal adalah dengan mengacu pada MEF (*Minimum Essential Force*). Konsep MEF didefinisikan sebagai suatu standar kekuatan pokok minimum TNI yang disiapkan sebagai prasyarat utama serta merupakan dasar bagi keefektifaannya tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman yang bersifat aktual (Badan Sarana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2010). *Minimum Essential Force* merupakan gebrakan pemerintah dalam subjek strategi pertahanan nasional. Ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, MEF merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan. Implementasi MEF dibagi ke dalam tiga Rencana Strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1: 2010-2014, Renstra 2: 2015-2019, dan Renstra 3: 2020-2024. Dalam Renstra 1, pemerintah menganggarkan dana 156 Trilliun (Saragih, 2013) untuk penyediaan alutsista. Pada Renstra 2, pemerintah menganggarkan dana untuk TNI sebesar 106 Trilliun (Supriatin, 2018), sedangkan untuk Renstra 3 masih direncanakan penganggarannya.

Tujuan utama MEF adalah untuk membangun komponen utama TNI mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional. Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk

pada fakta MEF tidak mengarah pada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi membangun kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal (Rusman, 2018).

Ekspektasi utama pengimplementasian MEF ialah Indonesia memiliki sebuah kekuatan pertahanan yang handal untuk dioperasikan dan tidak bergantung pada asistensi negara lain. Untuk itu, MEF difokuskan pada pembangunan Alutsista TNI dengan memperhatikan jenis dan produk Alutsista yang dibutuhkan, anggaran pembelian Alutsista, dan durasi pengadaan Alutsista yang diperlukan. Dalam hal ini, kita mempunyai industri dalam negeri melalui PT. PINDAD sebagai tempat produksi senjata, amunisi dan kendaraan, lalu PT. PAL menangani pembuatan kapal, dan PT. Dirgantara Indonesia untuk pesawat terbang (Rusman, 2018).

Berangkat dari kesadaran pentingnya peningkatan kualitas TNI, sudah saatnya bagi Indonesia untuk merevitalisasi Alutsista TNI yang sudah usang. Indonesia memiliki laut dalam negeri seluas 93.000 km persegi termasuk selat, teluk, dan laut ditambah dengan area laut luar termasuk laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif /ZEE mencapai total lima juta km persegi (Rusman, 2018).

Salah satu Alutsista yang perlu direvitalisasi TNI adalah kapal selam. Sejak Perang Dunia I, kapal selam sering digunakan sebagai pemburu kapal permukaan yang mematikan dan diuntungkan karena kesenyapannya. Hal ini disebabkan karena kapal selam mempunyai beberapa keunggulan yang mampu memberikan efek penggentar (*deterrence effect*) yang efektif untuk musuhnya (Rizanny, 2017).

Strategi pertempuran dan teknologi yang dimiliki kapal selam, meliputi *stealth*, *covert*, asimetris, dan keuntungan akses di laut, memberikan banyak keuntungan

yang bisa membuahkan kemenangan untuk kapal selam dalam peperangan, memberikan efek besar kepada musuh dan membuat kapal selam lebih superior daripada kapal perang lainnya di pertempuran. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengoperasikan kapal selam dalam angkatan lautnya, juga harus memanfaatkan kelebihan yang dimiliki kapal selam (Rizanny, 2017).

Indonesia memiliki tugas berat dalam menentukan seberapa banyak kekuatan kapal selam yang diperlukan dan bagaimana pola operasi untuk kapal selam. Mencermati letak geografis dan perkembangan lingkungan strategis regional, Indonesia memerlukan kapal selam konvensional yang berukuran besar agar dapat beroperasi jauh dari pangkalan (Rizanny, 2017).

Satuan kapal selam nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara Indonesia sebagai *leadership role* di kawasan regional dan ikut serta dalam permasalahan global. Hal ini konsisten dengan paradigma TNI AL yaitu Menjadi Angkatan Laut Berkelas Dunia (*World Class Navy*) (Rizanny, 2017).

C. Kekuatan TNI

Awal tahun 2010 Indonesia berusaha untuk memperkuat TNI agar mencapai standar kekuatan MEF. MEF dibagi menjadi tiga tahap rencana strategis sampai tahun 2024. Pada awalnya pemerintah menganggarkan Rp156 triliun untuk penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI pada periode MEF 2010-2014 (Saragih, 2013).

Sampai saat ini belum semua alutsista yang dimiliki TNI AD mengalami modernisasi. Dengan kondisi tersebut, dapat kita lihat Angkatan Darat memperkuat pasukan yang bersifat mobile, yang dapat dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam waktu cepat.

Target ini dimasukkan dalam Rencana Strategis 1 (Renstra 1 :2010-2014) dengan munculnya pembelian, IFV Marder, MLRS Astros II, Meriam Caesar 155 mm, ATGM NLAW, kendaraan taktis, MBT Leopard 2 hingga helikopter serang Apache AH-64 E. Semua yang dibeli bersifat mobile, dapat digerakkan dengan cepat diangkut melalui kapal permukaan maupun pesawat angkut Hercules (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Untuk meningkatkan kemampuan mobilisasi pasukan *mobile*, Indonesia membeli pesawat Hercules eks RAAF Australia. Begitu pula dengan persenjataan dan kemampuan prajurit Kostrad, terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pasukan Kostrad dapat digerakkan kemanapun di wilayah tanah air. Mereka tidak memiliki wilayah. Wilayah yang mereka tempati berada di bawah kendali Panglima Kodam (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2017).

Konsep renstra 1 Angkatan Darat, memiliki kesamaan target yang dikejar oleh TNI AU. TNI AU menyiapkan pesawat tempur yang bisa bergerak cepat, bertarung secara seimbang di wilayah manapun di Indonesia. Angkatan Udara harus tampil perkasa, di tengah minimnya pertahanan wilayah Indonesia dan kemampuan arhanud. Untuk itu, Skadron Sukhoi telah dilengkapi rudal berbagai jenis, dari *air-to-air*, *air-to-ground*, hingga rudal penghancur radar (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Pada renstra 1, pesawat tempur sukhoi TNI AU telah genap satu skuadron (16 pesawat) dan juga mendapatkan tambahan satu skuadron (16 pesawat) pesawat super tucano untuk jenis pertempuran taktis "*close air support*", intai serta serangan anti-gerilya. Adapula 30 pesawat F-16 block 25/32 retrofit eks AS, serta pesawat latih T-50 i dari Korea Selatan yang bisa difungsikan sebagai air support, dan UAV Heron komposit untuk pengawasan (Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Pada renstra 1, kekuatan Angkatan Laut difokuskan untuk dapat menghadapi ancaman aktual di beberapa *flash point*. Fokus utama untuk renstra 1 adalah ancaman yang dapat muncul di wilayah Ambalat. TNI AL telah memperkuat armada kapal selam mereka. Angkatan Laut juga membangun kekuatan strategis untuk kapal permukaan dengan memasang rudal yakhont 300 km di kapal Van Speijk Class. Pada uji pertama rudal yakhont overshoot terhadap sasaran, maka pada uji kedua telah mengenai sasaran. Kuatnya daya hancur rudal yakhont, dalam hitungan detik kapal sasaran tembak langsung tenggelam. Ujicoba ketiga nanti seharusnya ditujukan terhadap sasaran bergerak dengan jangkauan 250-300km, untuk mengetahui apakah rudal yakhont frigate van speijk mampu mengunci terus menerus sasaran yang sedang bergerak. Ujicoba penembakan jarak jauh ini memerlukan helikopter OTHT yang sedang disiapkan TNI AL (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Untuk keperluan modernisasi, TNI AL memesan 2 PKR Sigma ke Belanda serta membeli 3 light frigate Nakhoda Ragam Class dari Inggris. Sementara untuk kuantitas, TNI AL membangun kapal-kapal kecil dengan kemampuan serang rudal. Diharapkan pada tahun 2013 KCR-60 pertama pesanan TNI AL sudah bisa diluncurkan plus dengan kemampuan serang rudal. Adapun untuk Marinir, pasukan ini mendapatkan tambahan 17 Tank BMP-3F. Marinir membutuhkan 95 tank sejenis BMP, yakni 81 unit tipe BMP-3F, 10 unit tipe BMP-3FK, dan 4 unit tipe BREM-L dan akan penuh secara bertahap (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Budget Renstra 2010-2014 untuk modernisasi Alutsista TNI, dianggarkan Rp 156 triliun, dengan Base Line sebesar Rp. 99 triliun dan On-Top Rp 57 triliun.

Alhasil alutsista yang datang pada renstra 1 cukup membanggakan. 50% dari budget tersebut, untuk pengembangan dan modernisasi alutsista Angkatan Darat (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Renstra II merupakan titik krusial yang bila dilalui dengan benar, akan membuat postur pertahanan Indonesia mandiri dan semakin berwibawa. Namun tantangan di renstra II ini sangat berat (Saragih, 2013).

Untuk Angkatan laut, Kementerian Pertahanan sedang menggarap proyek kapal selam Changbogo dengan Korea Selatan. Ditargetkan pada tahun 2015, kapal selam ketiga dapat dibangun di PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Begitu pula dengan kapal perang Perusak Kawal Rudal Sigma Belanda yang diharapkan bisa dibangun di Indonesia, menjadi program Korvet nasional atau Frigate Nasional (Saragih, 2013).

Apabila proyek tersebut dapat terealisasi, maka Indonesia bolehlah berbangga hati, namun jika tidak berhasil, berarti kemampuan negeri ini baru sebatas membeli alutsista, dan akan semakin tertinggal dari negara-negara “satu lechting”, seperti; India, Pakistan, Iran, Turki, China, Korea Selatan, bahkan Korea Utara (Wibowo, 2017).

Saat ini, TNI AL hanya mengoperasikan dua kapal selam kelas U-209 buatan Jerman, yaitu KRI Cakra/401 dan KRI Nanggala/402. Kapal selam yang datang tahun 1981 ini tentu usianya sudah tidak muda lagi di tengah tuntutan tugas negara yang padat (Wibowo, 2017)

Pengalaman pengoperasian kapal selam kelas Cakra selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa hanya dengan dua kapal selam, adalah sangat jauh dari jumlah ideal yang diperlukan dalam mempertahankan kehadiran kapal selam di kawasan sampai tidak memiliki efek penggentar. Di dalam MEF disebutkan bahwa minimal 12 kapal selam diperlukan untuk mempertahankan postur operasi kapal selam yang efektif (Rizanny, 2017).

Apabila mampu mengoptimalkan kelebihan, Indonesia akan dapat memaksimalkan efek penggentar secara strategis yang dapat mempengaruhi pilihan taktik musuh. Indonesia memerlukan kapal selam yang mampu beroperasi dan hadir secara terus menerus di area yang jauh (Rizanny, 2017).

Pola operasi dua belas kapal selam harus efektif dan terus menerus sehingga mampu menjawab kehadiran pada wilayah rawan dan misi yang berbeda. Rotasi dengan tiap empat kapal selam melaut, empat kapal selam dalam status siaga dan empat dalam perawatan akan dapat mengeksplorasi kemampuan kapal selam secara optimal dan lebih penting lagi dapat mengeksplorasi wilayah bawah laut di kawasan regional (Rizanny, 2017).

Pada renstra 2 akan ada pembentukan dan penempatan pasukan di beberapa wilayah strategis, seperti Divisi III Marinir di Sorong Papua. Sebanyak 15.000 pasukan marinir akan ditempatkan secara bertahap, untuk mendukung keamanan dan pertahanan di komando wilayah laut timur. Angkatan Laut juga membangun Pangkalan Kapal Selam baru di Palu, Sulawesi Tengah (Choiriah, 2015).

D. Industri Pertahanan Dalam Negeri

Industri pertahanan adalah pemasok utama kebutuhan militer suatu negara, yang memiliki kepentingan yang berbeda dari pelanggannya. Industri pertahanan adalah suatu organisasi yang dibangun berdasarkan prinsip ekonomi mikro, yaitu setiap penggunaan sumber daya harus dibayar dari pemasukan. Penggunaan sumber daya ini meliputi penggunaan energy dan mesin, pembelian bahan mentah, pembayaran gaji karyawan, kegiatan promosi, kegiatan riset dan

pengembangan, dan lain-lain. Pemasukan bagi industri, seperti perusahaan lainnya, adalah dari penjualan hasil produksinya. Industri dianggap sehat (secara finansial) jika pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya (Montana, 2014).

Sedangkan militer adalah organisasi yang dibentuk bukan dari prinsip ekonomi. Militer adalah perangkat negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pertahanan negara dengan menggunakan hard power dalam menghadapi ancaman yang membahayakan negara. Dalam militer tidak ada laba atau pemasukan. Yang ada hanya kemampuan (*military capacity*), penciptaan efek *deterrence* dan pengeluaran (*military expenditure*) (Davis, 2014). Militer dianggap berhasil apabila dapat menetralkan ancaman negara di bidang pertahanan negara. Militer membutuhkan sarana pertahanan yang dianggap paling mampu menunjang tugas pokoknya. Sumber barang bukanlah hal yang utama bagi militer, yang terpenting adalah kualitas, kuantitas, kehandalan sarana pertahanan yang diadakannya, tidak adanya embargo dan pembatasan penggunaan sarana pertahanan (Montana, 2014).

Kedua entitas di atas (industri pertahanan nasional dan militer Indonesia) memiliki perbedaan signifikan, jika militer menuntut produk yang memiliki kualitas dan standar yang tinggi, maka industri pertahanan yang belum matang (*infant industry*) belum mampu memproduksinya. Namun sebaliknya, jika militer harus membeli produk yang baru mampu diproduksi dalam negeri, yang dikhawatirkan adalah kualitasnya tidak memenuhi standar militer yang diharapkan. Sementara itu, jika ada kemampuan memproduksi produk yang berkualitas, namun produk yang dipesan militer jumlahnya di bawah *economies of scale*, maka industri pertahanan nasional kesulitan untuk memproduksi dengan harga yang bersaing dengan produk impor. Sehingga diperlukan kesepahaman antara pihak militer dan industri pertahanan nasional

untuk menyamakan persepsi dan menetapkan tujuan yang selaras demi mencapai manfaat yang bersifat lintas sektoral, yaitu perdagangan, pertahanan, industri dan ekonomi. Artinya, dicapainya titik temu dimana pihak militer tetap mendapatkan produk yang sesuai standar militer, namun masih mendatangkan laba yang signifikan bagi industri pertahanan nasional (Montana, 2014).

Industri adalah suatu sistem yang terdiri dari kelompok sub-sistem. Sub-sistem ini membentuk piramida. Kelompok yang paling bawah adalah sub-sistem industri hulu yang memproduksi berbagai barang mentah dan barang dasar bagi industri di atasnya. Industri hulu ini seperti industri baja, industri bahan kimia, industri pembuat baut, ring, dan lain-lain. Industri menengah memproduksi komponen dan barang setengah jadi kepada industri hilir. Industri ini meliputi industri mesin, industri komponen frame, industri elektronika, dan lain-lain. Industri hilir merupakan industri yang memproduksi barang akhir, seperti industri pesawat (seperti PTDI), industri persenjataan (seperti PT. Pindad), industri kapal (seperti PT. PAL), dan lain sebagainya (Montana, 2014).

Sistem industri mapan (*matured*) adalah sistem industri yang dibentuk dari hulu ke hilir. Artinya, industri pembuat barang mentah dan komponen sudah didominasi oleh industri dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap dukungan dari bahan impor dapat diminimalisir. Masing-masing *sub-sistem industry* tersebut membutuhkan level produksi yang melampaui *economies of scale*-nya masing-masing supaya mampu bertahan dan bertumbuh secara berkesinambungan. Semakin ke hulu, *economies of scale*-nya semakin besar, dikarenakan nilai tambah yang dihasilkan relatif semakin kecil. Contohnya, industri pembuatan baut akan mencapai *economies of scale* apabila mampu memproduksi 1 juta baut. Namun bagi industri sepeda, *economies of scale* mamapu dicapai jika memproduksi 100.000 unit saja. Semakin ke hilir, kebutuhan penguasaan teknologi dan investasi semakin

tinggi. Sehingga bagi negara berkembang yang ingin mengembangkan industrinya, memulai mengembangkan industrinya dari hulu ke hilir (Montana, 2014).

Sementara itu, negara berkembang dengan keterbatasannya akan membangun kekuatan militernya secara gradual. Postur pertahanan yang akan dibangun jika dihadapkan pada potensi ancaman yang muncul dari militer asing yang menentukan spektrum perang yang akan dihadapi. Andi Widjajanto menyebutkan ada 3 (tiga) spektrum perang yang dihadapi suatu negara, yaitu: spektrum perang asimetris negatif, simetris, dan asimetris positif (Widjajanto, 2014).

Pertama adalah spektrum asimetris negatif, dimana suatu negara menghadapi musuh atau ancaman yang memiliki kekuatan militer yang lebih kuat (Kaplowitz, 1990). Dalam spektrum perang ini, perang yang berlangsung bersifat sporadis dengan intensitas rendah. Persenjataan infantri lebih mendominasi perlawanan terhadap musuh yang sudah mendominasi kekuatan laut dan udara. Pasukan tersebut bersifat ofensif dan militer musuh bersifat defensif. Kemenangan ditentukan dari pihak yang paling lama sanggup bertahan dalam situasi yang bersifat atrisi (*war of attrition*).

Kedua, spektrum simetris, suatu negara menghadapi kekuatan musuh yang memiliki kekuatan yang seimbang. Perang yang terjadi melibatkan pertempuran antar alutsista sejenis. Taktik dan strategi yang menentukan kemenangan. Akan tetapi situasi perang simetris hampir sulit terwujud, dikarenakan setiap negara akan berupaya untuk mendapatkan dukungan pihak asing untuk memperkuat kekuatan militernya, baik dengan menjalin aliansi maupun kontra aliansi (Morgenthau, 2010).

Yang terakhir adalah spektrum asimetris positif, dimana suatu negara menghadapi musuh yang memiliki kekuatan militer yang lebih lemah. Situasi ini jarang melibatkan musuh berupa negara. Aktor musuh yang dalam spektrum ini biasanya adalah insurgent atau teroris

yang memiliki motivasi dilandasi masalah ideologis, politik, ekonomi maupun budaya (Montana, 2014).

Untuk membangun suatu industri yang berskala besar, maka kompetensi inti harus diidentifikasi dahulu sebelum kemudian dikuatkan melalui kebijakan pemerintah yang tepat. Perlu adanya dukungan dari pihak militer sebagai end user untuk membangun kompetensi inti industri pertahanan nasional dengan menerima segala kekurangannya. Industri nasional yang belum kuat cenderung menghasilkan kualitas produk yang masih belum memenuhi standar dengan biaya yang relatif mahal jika dibandingkan dengan produk impor. Namun jika produk industri pertahanan nasional tidak didukung pihak militer dan pemerintah, maka industri pertahanan nasional tidak mampu untuk membuat produk yang kompetitif dan militer Indonesia terus bergantung dari produk impor (Montana, 2014).

Namun kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa kita sepenuhnya dapat mengandalkan produk pertahanan dari dalam negeri. Industri pertahanan nasional juga memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknologi, SDM, finansial, dan lain-lain yang membuat industri pertahanan domestik harus memilih produk unggulan apa yang akan diproduksi dan menghasilkan pemasukan yang signifikan (Montana, 2014).

Produk pertahanan yang tidak menjadi produk unggulan terpaksa diimpor dari industri negara lain. Pemilihan produk pertahanan yang dibuat dalam negeri tidak selalu yang bersifat teknologi rendah. Demikian juga dengan pemilihan produk pertahanan yang dibeli dari luar negeri tidak harus yang memiliki teknologi tinggi. Namun yang menentukan adalah produk pertahanan yang dibeli dari dalam negeri harus merupakan produk yang memiliki komponen dari hasil kompetensi inti industri pertahanan nasional. Contohnya adalah produk kendaraan lapis baja. Kompetensi PT. Pindad adalah melas, memotong dan membentuk lempeng logam menjadi suatu frame

kendaraan darat. Semua jenis produk pertahanan yang terdapat unsur pekerjaan melas, memotong dan membentuk lempeng logam sudah selayaknya diadakan dari PT. Pindad, baik pengadaan kendaraan tempur (Anoa dan Tarantula), kendaraan taktis (Komodo), dan juga kendaraan dinas seperti Vios, Avanza, Innova, Camry, dan Corolla (Montana, 2014).

Identifikasi kompetensi inti suatu industri membutuhkan suatu proses kognitif yang mendalam dan melibatkan pihak ahli profesional dari luar dan dalam industri. Namun untuk langkah pembuka, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kompetensi inti dari beberapa industri pertahanan nasional besar, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, supaya dapat dijadikan sebagai bahan dalam mensitesa strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat pengadaan sarana pertahanan bagi industri pertahanan nasional. Identifikasi kompetensi inti akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu dalam kelompok penyiapan sarana pertahanan dalam spektrum perang asimetris negatif (1), dalam spektrum perang simetris (2), dan dalam spektrum perang asimetris positif (Montana, 2014).

Dalam studi kasus kebijakan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam kelas Chang Bogo DSME 104/1400, hal tersebut termasuk dalam identifikasi kompetensi spektrum perang simetris. Dalam spektrum perang ini, sarana pertahanan yang cenderung diadakan adalah yang dapat mengimbangi persenjataan negara tetangga. Hal ini dikarenakan, ancaman militer umumnya berasal dari negara terdekat.

Strategi pemerintah pusat dan militer yang relevan untuk membangun industri pertahanan nasional dalam penyiapan kekuatan militer di spektrum perang simetris adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sesedikit mungkin jenis persenjataan dan mengoptimalkan jumlah di masing-masing jenis persenjataan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat economies of scale seoptimal mungkin agar pihak Indonesia dapat diberi konsesi TOT yang signifikan dari OEM persenjataan. Contohnya untuk *Main Battle Tank* ditetapkan hanya Leopard 2, tank medium hanya Marder, dan tank ringan hanya AMX-13. Tidak harus mengimpor tank jenis lain dari tipe yang sudah ada. Dengan catatan, PT. Pindad harus mendapatkan konsesi pekerjaan dari penambahan tank Leopard 2, Marder dan AMX-13. Termasuk juga untuk matra laut, frigat yang dibeli hanya kelas Sigma 10514 dan kapal selamnya hanya kapal selam kelas Chang Bogo. Tidak perlu membeli frigat dan kapal selam tipe lain dahulu, melainkan hanya penambahan Sigma 10514 dan Chang Bogo yang memberi konsesi TOT pada PT. PAL. Sedangkan untuk matra udara, lebih bijak untuk menggunakan sesedikit mungkin tipe pesawat tempur. Jika harus ada balance antara pesawat tempur buatan Nom NATO dan NATO, maka idealnya TNI AU dilengkapi pesawat tempur tipe Su-30MKM dan F-15E saja yang sama-sama bertipe *molutirole combat aircraft* dan *air superiority*, sepanjang masing-masing pabrikan (Sukhoi dan Boeing) memberi TOT kepada PTDI.
2. Apabila alutsista yang sudah dapat diproduksi sendiri, seperti tank ringan oleh PT. Pindad, frigat oleh PT. PAL, dan MPA oleh PTDI, maka pemerintah perlu mendorong promosi ke negara lain. Peran lembaga keuangan seperti Bank Ekspor

- Indonesia sangat diperlukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pihak pembeli produk industri pertahanan nasional di pasar ekspor.
3. Meningkatkan koordinasi antara militer dan industri pertahanan nasional dalam menyepakati opsi TOT yang diharapkan dari setiap program pengadaan alutsista dari pihak OEM. Harapannya, program pengadaan alutsista dapat memberi manfaat bagi pembangunan kapasitas industri pertahanan nasional, terutama dalam membangun kompetensi inti yang bersifat strategis.

E. Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan dalam bab ini, Kementerian Pertahanan menyiapkan postur pertahanan negara yang disusun berdasarkan keterpaduan antara kekuatan, kemampuan, dan penggelaran sumber daya nasional yang disusun dalam sistem pertahanan negara. Postur pertahanan negara Indonesia dikembangkan dari strategi pertahanan negara dengan menimbang faktor geopolitik dan geostrategi Indonesia, serta karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas.

Dalam mencapai postur pertahanan yang ideal, ada tiga parameter yang dapat digunakan, yaitu strategi pertahanan negara, postur pertahanan militer dan doktrin TNI. Ada pula kebijakan dalam membangun postur perthanan Indonesia yang ideal adalah dengan mengacu pada MEF (*Minimum Essential Force*). Konsep MEF didefinisikan sebagai suatu standar kekuatan pokok minimum TNI yang disiapkan sebagai prasyarat utama serta merupakan dasar bagi keefektifaannya tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman yang bersifat aktual.

Implementasi MEF dibagi ke dalam tiga Rencana Strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1: 2010-2014, Renstra 2: 2015-2019, dan Renstra 3: 2020-2024. Dalam mencapai MEF, industri dalam negeri sangat berperan dalam terwujudnya postur pertahanan yang mengacu pada MEF.

Industri pertahanan dalam negeri menyiapkan 3 identifikasi kompetensi inti dalam tujuan sarana pertahanan nasional untuk memperkuat TNI yang dibagi menjadi berdasarkan spektrum jenis perang, yaitu: spektrum perang asimetris negatif (1), dalam spektrum perang simetris (2), dan dalam spektrum perang asimetris positif.

Dalam studi kasus kebijakan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam kelas Chang Bogo DSME 209/1400, hal tersebut termasuk dalam identifikasi kompetensi spektrum perang simetris. Dalam spektrum perang ini, sarana pertahanan yang cenderung diadakan adalah yang dapat mengimbangi persenjataan negara tetangga. Hal ini dikarenakan, ancaman militer umumnya berasal dari negara terdekat. Maka dari itu pada bab berikutnya akan dijelaskan tentang pentingnya kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400 serta alasan Indonesia memilih bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pembelian dan pengembangan kapal selam.